

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada masa sekarang pembangunan sangat memperhatikan aspek berkelanjutan. Dimana salah satu upaya mewujudkan konstruksi yang berkelanjutan adalah dengan memperhatikan dampak dari kegiatan konstruksi terhadap lingkungan. Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaan dan pengaplikasian *green construction* dalam salah satu upaya mewujudkan konstruksi yang berkelanjutan.

Sebuah proyek dapat dikatakan hijau apabila dalam seluruh siklus hidup proyek tersebut berorientasi pada *green*. Siklus proyek konstruksi dimulai dari perencanaan, pengadaan, konstruksi operasional, perawatan hingga dekonstruksi. Pada tahap pengadaan juga harus berorientasi pada konsep *green* yang disebut *green procurement*. Pengadaan pada proyek konstruksi merupakan suatu proses pemenuhan kebutuhan barang/jasa oleh LKDI (Kementrian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Institusi lainnya) yang manfaatnya juga untuk masyarakat dengan meminimalkan dampak.

Proses pengadaan memiliki peran yang kuat dalam siklus hidup dari proyek konstruksi dan juga berfungsi mendorong keberhasilan penerapan konsep berkelanjutan. Pengadaan hijau yang mengacu pada praktik merumuskan persyaratan yang berkaitan dengan lingkungan dalam proses tender, atau dapat dikatakan sebagai proses penerapan pertimbangan

lingkungan kedalam proses pemilihan kontraktor disebut juga *Green Public Procurement*. Maka dari itu terdapat perbedaan mendasar yang umumnya belum banyak diketahui mengenai *Green Procurement (GP)* dan *Green Public Procurement (GPP)*. Berikut ini pengertian yang membedakan GP dan GPP.

Tabel 1.1 Pengertian GPP dan GP

<i>Green Public Procurement (GPP)</i>	<i>Green Procurement (GP)</i>
<p>Setiap aktivitas dilingkungan pemerintahan pasti membutuhkan keberadaan barang dan/atau jasa yang setiap prosesnya memperhatikan keberlangsungan dan kelestarian lingkungan disebut juga <i>Green Public Procurement</i>.</p> <p><i>Sumber: Badan Diklat DIY, 2018</i></p>	<p>GP merupakan skala kecil dari manajemen lingkungan. GP juga dapat dikatakan proses suatu organisasi mengembangkan dan menerapkan kebijakan lingkungan yang timbul dari proses pembelian barang/jasa.</p> <p><i>Sumber: Tri Hendro. A, 2009</i></p>
<p>GPP dapat diartikan sebagai otoritas publik dalam upaya membeli barang, jasa, dan bekerja dengan dampak lingkungan yang diminalkan sepanjang siklus hidupnya jika dibandingkan dengan fungsi utama.</p> <p><i>Sumber: European Commision, 2016</i></p>	<p>GP merupakan salah satu tahapan dalam siklus hidup proyek yang dapat berupa pengadaan jasa atau pengadaan berbagai material yang digunakan.</p> <p><i>Sumber: Wulfram E, 2010</i></p>

Pembangunan berkelanjutan yang semakin gencar diterapkan dianggap sebagai salah satu solusi dari isu pemanasan global yang disertai dengan perubahan iklim, dimana pemanasan global dan perubahan iklim merupakan salah satu dampak dari proses pembangunan. Kebutuhan akan infrastruktur yang semakin meningkat, menyebabkan dampak dari proses pembangunan juga akan meningkat. Penerapan konsep ramah lingkungan sangat penting dalam merespon pembangunan infrastruktur, terutama melalui proses pengadaan infrastruktur khususnya jalan. Pengadaan jalan berpotensi untuk mengurangi tiga jenis emisi rumah kaca berupa emisi langsung dari proses pembangunan jalan termasuk perubahan penggunaan lahan, emisi tertanam pada bahan yang digunakan dan dampak dari pemeliharaan dan operasional di jalan.

Proses pengadaan jalan di Indonesia memerlukan kerangka indikator yang dapat digunakan sebagai acuan dalam membangun infrastruktur jalan yang ramah lingkungan. Kerangka indikator tersebut mengacu pada prinsip-prinsip *green* yang sangat mendukung tercapainya konsep pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan studi mengenai indikator untuk pengadaan jalan di Indonesia. Studi pada penelitian ini mengacu pada dokumen *European Commission* dikarenakan lembaga ini sudah mengembangkan lebih dari 20 kriteria GPP sejak tahun 2008, dan pengembangan yang dilakukan disesuaikan pada ISO (*International Organization for Standardization*) 14001 tentang sistem manajemen lingkungan.

Studi ini juga mengadopsi pembagian fase pengadaan pada proyek jalan dari dokumen *Evaluation Of Green Public Road Procurement In Australia: Current Practices And Gaps To Fill*, dimana dokumen tersebut dibuat berdasarkan hasil *Conference on Smart and Sustainable Built Environments* (SASBE2012). Indikator yang disusun pada penelitian ini juga menyesuaikan pada penelitian sebelumnya yang sudah ada yaitu Usulan Indikator Jalan Berkelanjutan Untuk Indonesia yang ditulis oleh Greece Maria Lawalata. Maka dari itu studi ini merepresentasikan keadaan pengadaan jalan di Indonesia yang juga disesuaikan dengan pengadaan jalan ramah lingkungan di negara-negara maju.

1.2. **Rumusan Masalah**

Dari latar belakang seperti diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Indikator apa yang dapat diterapkan dalam proses pengadaan ramah lingkungan pada proyek jalan di Indonesia ?
2. Bagaimana tingkat penerapan indikator pengadaan ramah lingkungan pada proyek jalan di Indonesia yang sudah dilakukan?

1.3. **Batasan Masalah**

Dalam penulisan penelitian ini batasan masalah diperlukan agar ruang lingkup yang dibahas tidak menyimpang dari tujuan awal. Batasan masalah meliputi :

1. Analisis dilakukan hanya dalam lingkup proses pengadaan ramah lingkungan di bidang proyek jalan.
2. Analisis tingkat penerapan yang dilakukan oleh peneliti hanya mencakup Pulau Sumatra, Jawa, dan Papua.
3. Analisis lingkup pengadaan yang dimaksud ditinjau terhadap 3 fase konstruksi yang meliputi: fase perencanaan, fase pembangunan dan fase pemeliharaan.
4. Penyusunan indikator proses pengadaan pada proyek jalan ramah lingkungan mengacu pada dokumen *European Commission (EU) Green Public Procurement Criteria for Road Design, Construction and Maintenance*, dokumen *Evaluation Of Green Public Road Procurement In Australia: Current Practices And Gaps To Fill* dan Jurnal mengenai Usulan Indikator Jalan Berkelanjutan Untuk Indonesia.

1.4. **Keaslian Tugas Akhir**

Menurut referensi dan pengamatan yang ada di Universitas Atma Jaya Yogyakarta tugas akhir dengan judul Studi Implementasi *Green Public Procurement* Pada Proyek Jalan di Indonesia belum pernah dilakukan sebelumnya.

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian berikut adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui indikator yang dapat diterapkan dalam proses pengadaan ramah lingkungan pada proyek jalan di Indonesia.
2. Mengetahui sudah sejauh mana dan seperti apa tingkat penerapan indikator pengadaan ramah lingkungan pada proyek jalan di Indonesia.

1.6. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Mendapat pengetahuan mengenai tingkat penerapan yang sudah dilakukan dan mengetahui indikator yang dapat diterapkan pada proses pengadaan ramah lingkungan pada proyek jalan.

2. Bagi pembaca

Mendapatkan referensi mengenai indikator pengadaan ramah lingkungan pada infrastruktur jalan berkelanjutan yang dapat diterapkan di Indonesia dan mengetahui tingkat penerapan yang sudah dilakukan.